

ABSTRAK

Perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang penting dalam hukum pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah tindakan pelaku yang dilakukan atas perintah atasan dapat dibenarkan secara hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis legal mengenai kerangka hukum yang mengatur perintah jabatan serta penerapan alasan penghapus pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perintah jabatan dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kewenangan dari atasan yang memberikan perintah dan itikad baik dari bawahan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun, terdapat perbedaan penafsiran antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam berbagai putusan pengadilan. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam penerapan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yang menuntut kejelasan lebih lanjut dalam regulasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan konsisten mengenai penerapan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para praktisi hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penerapan perintah jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani isu perintah jabatan dalam hukum pidana di Indonesia..

Kata Kunci: Perintah jabatan – Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana – Hukum Pidana Indonesia

ABSTRACT

The position order as a reason for eliminating criminal liability is an important concept in criminal law, with the aim of determining whether the perpetrator's actions carried out on the orders of a superior can be legally justified. This study focuses on a legal analysis of the legal framework governing the position order and the application of the reason for eliminating criminal liability in the context of Indonesian criminal law. The research method used is normative, with a conceptual approach and a case approach.

The results of the analysis show that the position order can be used as a reason for eliminating criminal liability if it meets certain requirements, such as the authority of the superior who gave the order and the good faith of the subordinate in carrying out the order. However, there are differences in interpretation between the Public Prosecutor and the Panel of Judges in various court decisions. This difference indicates uncertainty in the application of the position order as a reason for eliminating criminal liability, which requires further clarity in the regulation.

Therefore, this study suggests the need for clearer and more consistent regulations regarding the application of the position order as a reason for eliminating criminal liability. In addition, a more comprehensive understanding is needed for legal practitioners and the public to ensure justice and legal certainty in the practice of implementing the position order. This study is expected to contribute to the development of a more effective legal framework in dealing with the issue of position orders in criminal law in Indonesia.

Keyword: Order of office – Reasons for Abolition of Criminals Criminal Liability – Indonesian Criminal Law